



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

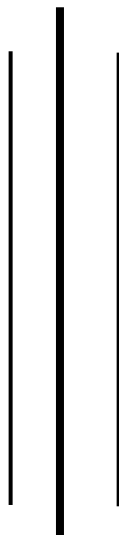
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

OPD KELURAHAN KEBUMEN

KECAMATAN KEBUMEN

KABUPATEN KEBUMEN – JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2021



KELURAHAN KEBUMEN

KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

JL. PEMUDA NO. 31 KEBUMEN 54311 Telp. (0287)

381383

K E B U M E N

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SLAMET RIYADI, S.M, M.M
NIP : 19680101 198803 1 009
Jabatan : Lurah Kebumen
SKPD/OPD : Kelurahan Kebumen

Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/OPD Kelurahan Kebumen untuk periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 merupakan tanggungjawab saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Laporan Keuangan SKPD/OPD sebagaimana tersebut nomor 1 yang menjadi tanggungjawab saya meliputi:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Operasional;
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
3. Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 31 Desember 2021

LURAH KEBUMEN

TTD

SLAMET RIYADI, S.M, M.M

Penata

NIP. 19680101 198803 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SKPD/OPD KELURAHAN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Iktisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD	
	3.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD
		3.1.1 LRA
		3.1.2 Neraca
		3.1.3 LO
		3.1.4 LPE
	3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual.
Bab IV	Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan	
Bab V	Penutup	

Kebumen, 31 Desember 2021

LURAH KEBUMEN

TTD

SLAMET RIYADI, S.M, M.M

Penata

NIP. 19680101 198803 1 009

BAB I

PEDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan OPD Kelurahan Kebumen di susun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan di harapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Di samping itu, laporan keuangan ini juga di maksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua yang telah di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah di terapkan kaidah - kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang - Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Restribusi Daerah;
5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
6. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang - undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasana Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada {emerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen;
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

C. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD.
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD.
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 2.1 Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos – pos Laporan Keuangan SKPD

- 3.1 Rincian dari penjelasan masing masing pos pelaporan keuangan SKPD :
 - 3.1.1 LRA
 - 3.1.2 LO
 - 3.1.3 Neraca
 - 3.1.4 LPE
 - 3.1.5 CALK

Bab IV Penjelasan dan informasi – informasi non keuangan

Bab V Penutup

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 841.142.140,00 dari anggaran sebesar Rp. 854.153.000,00 atau mencapai 98,48 %. Dan Apabila realisasi Tahun Anggaran 2020 yang sebesar Rp 1.143.856.140,00 dari anggaran Rp. 1.190.835.000,00 (96,05%). Realisasi Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,43 %.

1. Realisasi Belanja Per Akun

Rincian realisasi belanja per akun di sajikan sebagai berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A 2021	REALISASI T.A 2021	PROSEN TASE%
BELANJA			
Belanja Operasi			
1. Belanja Pegawai	16.373.000,00	15.528.000,00	94,8
2. Belanja Barang dan Jasa	757.780.000,00	745.889.140,00	98,4
3. Belanja Hibah/ Bantuan Sosial	75.000.000,00	75.000.000,00	100
Jumlah Belanja Operasi	849.153.000,00	836.417.140,00	98,5
Belanja Modal			
1. Belanja Modal Tanah			
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	4.725.000,00	94,5
3. Belanja Modal Gedung dan bangunan			
4. Belanja Modal Aset tetap Lainnya			
Jumlah Belanja Modal	5.000.000,00	4.725.000,00	94,5
JUMLAH BELANJA	854.153.000,00	841.142.140,00	98,48

2. Realisasi Belanja per kegiatan

URAIAN JENIS BELANJA Per Kegiatan	ANGGARAN T.A 2021	REALISASI T.A 2021	PROSEN TASE%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota			
<i>Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kierja Perangkat Daerah</i>	14.900.000,00	14.600.600,00	97,9
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.400.000,00	11.120.600,00	97,5
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.480.000,00	99,4
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	9.500.000,00	9.500.000,00	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	9.500.000,00	9.500.000,00	100
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	36.000.000,00	34.683.900,00	96,3
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	3.000.000,00	2.880.000,00	96
2. Penyediaan Bahan Lositik Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	100
3. Penyediaan Baran Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	4.997.900,00	99,9
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	3.000.000,00	2.965.000,00	98,8
5. Penyediaan Bahan/ Material	13.000.000,00	11.841.000,00	91,1
<i>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</i>	5.000.000,00	4.725.000,00	94,5
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	5.000.000,00	4.725.000,00	94,5
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	11.750.000,00	10.988.652,00	93,5
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000.,00	680.000,00	90,6
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	6.000.000,00	5.681.152,00	94,6
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000,00	4.627.500,00	92,5

<i>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</i>	17.500.000,00	16.975.738,00	97
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.000.000,00	6.579.738,00	93,9
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00	4.396.000,00	97,6
3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10.690.000,00	10.616.000,00	99,3
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.690.000,00	10.616.000,00	99,3
<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	657.313.000,00	651.489.250,0 0	99,1
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	518.913.000,00	513.302.600,0 0	98,9
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119.680.000,00	119.591.150,0 0	99,9
3. Evaluasi Kelurahan	18.720.000,00	18.595.500,00	99,3
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	91.500.000,00	87.563.000,00	95,6
1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	57.450.000,00	55.710.000,00	96,9
2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.	34.050.000,00	31.853.000,00	93,5

B. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PECAPAIAN TARGET YANG TELAH DI TETAPKAN

Hambatan yang di hadapi secara umum dalam pencapaian target anggaran yang telah di tetapkan pada Tahun Anggaran 2021 antara lain:

1. Belanja barang dan jasa di setiap program kegiatan terdapat anggaran yang tidak terserap di karenakan Standar Satuan Harga yang telah di tentukan nilainya lebih tinggi dari harga di pasar/ di lapangan .
2. Belanja Pembayaran rekening telepon dan rekening listrik tidak terserap 100 % di karenakan setiap bulannya untuk pebayaran tidak sama sehingga terdapat anggaran yang tidak terserap, namun apabila anggaran di minimkan di khawatirkan akan terjadi kekurangan anggaran seperti pada pembayaran rekening PDAM yang tidak dapat di bayarkan dengan anggaran Kelurahan karena kekurangan Anggaran di tahun ini.
3. Belanja bahan bakar minyak dan pelumas tidak terserap 100 % dikarenakan para pengguna motor dinas Kelurahan Kebumen terkadang lupa untuk mencetak struk pembelian, sehingga anggaran tidak terserap maksimal.
4. Pada Pekerjaan Pemeliharaan yang anggarannya di atas 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menggunakan sistem penawaran melalui aplikasi LPSE tidak terserap 100 % akibat adanya penawaran harga di bawah HPS sehingga terdapat kelebihan anggaran yang tidak terserap pada kegiatan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik.

BAB III
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN
RINCIAN DARI PENJELASAN MASING – MASING POS PELAPORAN KEUANGAN

A. BELANJA – LRA

Realisasi belanja OPD Kelurahan Kebumen Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 841.142.140,00 atau 98,48% dari anggaran sebesar Rp. 854.153.000,00. Rincian Anggaran dan Realisasi belanja tahun anggaran 2021 tersaji sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN T.A 2021	REALISASI T.A 2021	PROSEN TASE%	REALISASI 2020
BELANJA				
Belanja Operasi				
1. Belanja Pegawai	16.373.000	15.528.000	94,8	60.514.000
2. Belanja Barang dan Jasa	757.780.000	745.889.140	98,4	1.083.847.000
3. Belanja Hibah/ Bantuan Sosial	75.000.000	75.000.000	100	-
Jumlah Belanja Operasi	849.153.000	836.417.140	98,5	1.144.361.000
Belanja Modal				
1. Belanja Modal Tanah				
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000	4.725.000	94,5	46.474.000
3. Belanja Modal Gedung dan bangunan				
4. Belanja Modal Aset tetap Lainnya				
Jumlah Belanja Modal	5.000.000	4.725.000	94,5	46.474.000
JUMLAH BELANJA	854.153.000	841.142.140	98,48	1.190.835.000

Berdasarkan tabel di atas perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 dengan Tahun Anggaran 2020 menunjukkan bahwa realisasi belanja belanja pada Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,43 % dari 96,05 % menjadi 98,48 %. Dengan Rincian Belanja Operasi mengalami peningkatan sebesar 2,43 %

1. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sebesar Rp. 836.417.140,00 mencapai 98,5 % dari anggaran sebesar Rp. 849.153.000,00, apabila di bandingkan dengan realisasi 2020 yang sebesar Rp. 1.097.654.140,00 dari anggaran Rp. 1.144.361.000,00 (95,92 %) mengalami peningkatan sebesar 2,58%

Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja hibah. Adapun rincian realisasi atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa dan Belanja Hibah TA. 2021 dan 2020 tersaji sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN T.A 2021 (Rp)	REALISASI T.A 2021(Rp)	%	REALISASI 2020
1. Belanja Pegawai				
a. Gaji dan Tunjangan	-	-	-	-
b. Tambahan Penghasilan PNS	-	-	-	-
c. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/ WKDH	-	-	-	-
d. Intensif Pemunguta Restribusi daerah.	-	-	-	-
e. Lembur	-	-	-	9.835.000
f. Belanja Honorarium PNS	14.873.000	14.028.000	94	23.859.000
g. Belanja Honaorarium Non PNS	1.500.000	1.500.000	100	26.820.000
2. Belanja Barang dan Jasa				
a. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	106.924.000	104.621.538	98	27.334.000
b. Belanja Bahan / Material	-	-	-	13.063.000
c. Belanja jasa Kantor	71.308.000	69.200.252	97	67.780.000
d. Belanja Natura dan Pakan Natura	39.800.000	37.607.550	94	-
e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	-	-	7.000.000
f. Belanja Cetak dan Penggandaan	10.454.000	10.013.800	96	16.096.000
g. Belanja Sewa rumah / Gedung/ Gudang/ Parkir	-	-	-	-
h. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	-	-
i. Belanja Sewa alat berat	-	-	-	-
j. Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor	-	-	-	-

k. Belanja makanan dan minuman	-	-	-	74.149.000
l. Belanja Pakaian Dinas dan atributnya	-	-	-	8.428.000
m. Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	-
n. Belanja Pakaian Khusus dan hari tertentu	-	-	-	-
o. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54.075.000	54.075.000	100	3.000.000
p. Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-
q. Belanja Pemeliharaan	475.219.000	470.651.000	99	748.597.000
r. Belanja jasa Konsultasi	-	-	-	-
s. Belanja barang yang akan di serahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga	-	-	-	103.096.000
t. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-
u. Belanja Kursus, pelatihan, sosiaisasi dan bimbingan tekhnis PNS	-	-	-	-
v. Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	-
w. Biaya Jasa Pihak ketiga	-	-	-	15.304.000
x. Belanja Beasiswa peserta didik	-	-	-	-
y. Belanja Barang dan jasa BLUD	-	-	-	-
z. Uang untuk di berikan pihak ketiga / masyarakat	-	-	-	-
3. Belanja Hibah				
a. Belanja Hibah kepada kelompok masyarakat	-	-	-	-
b. Belanja hibah kepada organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	-
4. Belanja bantuan Sosial				
a. Belanja bantuan sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	-
b. Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	75.000.000	75.000.000	100	-
Total Belanja Operasi	849.153.000	836.697.140	98,5	1.144.361.000

2. Belanja Modal

Belanja Modal	2021		%	Realisasi 2020 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	5.000.000	4.725.000	94,5	46.202.000
Belanja Gedung dan bangunan	-	-	-	-
Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Aset tetap lainnya	-	-	-	-
Belanja Aset tak berwujud	-	-	-	-
JUMLAH	5.000.000	4.725.000	94,5	46.202.000

Realisasi belanja modal Tahun 2021 sebesar Rp. 4.725.000,- atau tercapai 94,5 % dari anggaran sebesar Rp. 5.000.00,-.

Adapun rincian belanja modal adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Belanja Tanah	-	-	-
2. Belanja Peralatan dan Mesin	5.000.000	4.725.000	94,5
3. Belanja Gedung dan bangunan	-	-	-
4. Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5. Belanja Aset tetap lainnya	-	-	-
6. Belanja Aset tak berwujud	-	-	-
JUMLAH	5.000.000	4.725.000	94,5

B. NERACA

1. ASET

a. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing masing sebesar Rp 1.696.500,- dan Rp. 1.924.300,- .

Aset lancar merupakan aset yang di harapkan segera untuk dapat di realisasikan atau di miliki untuk di pakai atau di jual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Kelurahan Kebumen per 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Aset Lancar	TA 2021	TA 2020
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	0.00	0.00
4	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
5	Piutang Pendapatan	0.00	0.00
6	Piutang Lainnya	0.00	0.00
7	Penyisihan Piutang	0.00	0.00
8	Beban dibayar di muka	0.00	0.00
9	Persediaan	1.696.500,00	1.924.300,00
	Jumlah	1.696.500,00	1.924.300,00

1. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan per 31 DseMBER 2021 dan 2020 masing masing adalah sebesar Rp. 1.696.500,- dan Rp. 1.924.300,-

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang di peroleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun saldo persediaan sebesar Rp. 1.696.500,- merupakan saldo persediaan atas bahan pakai habis yang belum habis/ belum di gunakan sampai dengan tanggal neraca.

NO	PERSEDIAAN	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Audited) (Rp)
1	Barang Habis Pakai	1.696.500,00	1.924.300,00
2	Bahan/ Material	-	-
3	Barang lainnya	-	-
	Jumlah	1.696.500,00	1.924.300,00

b. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 tersaji sebesar Rp. 32.460.203.277,- dan Rp. 27.198.578.957,-. Aset tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan di gunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Kelurahan kebumen per 31 Desember 2021 dan 2020 di sajikan pada tabel berikut :

Rincian Aset Tetap

No	Jenis	TA.2021	T.A 2020
1	Tanah	29.772.490.290	24.510.490.290
2	Peralatan dan Mesin	364.438.238	364.813.918
3	Gedung dan Bangunan	1.399.389.532	1.399.389.532
4	Jaln, Irigasi dan Jaringan	923.885.217	923.885.217
5	Aset Tetap lainnya		
6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
7	Akuntansi Penyusutan Aset Tetap		
	Jumlah	32.460.203.277	27.198.578.957

1) Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang di miliki Kelurahan Kebumen per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 29.772.490.290,- dan Rp. 24.510.490.290,-

2) Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 364.438.238,- dan Rp. 364.813.918,-

3) Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 1.399.389.532,- dan Rp1.399.389.532,-

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing masing Rp. 923.885.217,- dan Rp. 923.885.217,-

c. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 19.473.500,- dan Rp 4.820.000,-

Saldo per 31 Desember 2020	Rp. 4.820.000,-
Mutasi tambah :	
Belanja Modal 2021	Rp. -
Mutasi ke SKPD lain	Rp. -
Koreksi Tambah/ Relaks aset	Rp. -
Mutasi Aset :	
Penghapusan aset	Rp. -
Rusak berat	Rp. 4.820.000,-
Mutasi ke SKPD	Rp. -
Koreksi/ relaks aset	Rp. -
Total Kurang	Rp. -
Saldo per 31 Desember 2021	Rp. 19.473.500,-

BAB IV

PENJELASAN DAN INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

A. GAMBARAN UMUM KELURAHAN KEBUMEN

Kelurahan Kebumen merupakan Kelurahan Kota dan secara administratif Kelurahan kebumen termasuk dalam wilayah Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan batas-batas administratif :

Sebelah Utara : Kelurahan Bumirejo
Sebelah Timur : Desa Kembaran
Sebelah Selatan : Kelurahan Panjer
Sebelah Barat : Desa Kutosari

Wilayah Kelurahan Kebumen terdiri dari 44 RT dan 7 RW.

Dalam menjalankan tugas – tugas aparatur Kelurahan Kebumen melaksanakan fungsi- fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan termasuk di dalamnya melaksanakan tugas pelayanan masyarakat. Dalam menjalankan tugas- tugas pemerintahan umum selalu berkoordinasi dengan Forkompim Kecamatan Kebumen serta Unit Pelaksana Tekhni Dinas seperti UPT Dikpora , UPTD Pertanian, UPTD BPPKB, UPTD DPU dan UPT Puskesmas.

Periode Januari sampai dengan April 2021 Kelurahan Kebumen di pimpin oleh PLT. Lurah Kebumen yaitu RIBUT MISRIYAH, S.Sos, sedangkan Mei sampai dengan September PLT. Lurah Kebumen digantikan oleh SLAMET RIYADI, S.M,.M.M. Dan per 6 September 2021 menjadi Lurah definitif sampai dengan sekarang. Lurah dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Kelurahan, 3 (tiga) orang Kasi , 1(satu) orang Staf Kelurahan dan 9 (Sembilan) orang tenaga/ pegawai Non PNS terdiri dari Kepala Lingkungan 7 (tujuh) orang, Pembantu Umum 1 (satu) orang dan THL/ Pengadministrasi umum 1 (satu) orang.

B. EKONOMI MAKRO

Dari gambaran umumberikut ini yang akan di uraikan di harapkan kondisi ekonomi makro Kabupaten Kebumen ke depan dapat beromplikasi positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi di lihat dalam kerangka struktur pendapatan masyarakat, tabungan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Sesuai dengan kondisi Kabupaten Kebumen yang merupakan Daerah Agraris maka struktur ekonominya sangat didominasi oleh sektor pertanian. Sektor lain yang termasuk sektor dominan di samping sektor pertanian adalah sektor industri pengolahan. Tingginya peran gabungan sektor jasa jasa, sektor perdagangan, hotel dan rumah makan dan sektor industri pengolahan yang besar menunjukkan bahwa kesan sebagai daerah agraris makin berkurang. Pertumbuhan ekonomi di Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen juga menyumbang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen di antaranya adalah dari sektor jasa- jasa sektor perdagangan, hotel dan rumah makan, sektor industri dan sektor pertanian.

C. KEBIJAKAN KEUANGAN

Penyusunan Kebijakan Keuangan Sub Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen berdasarkan pada Rencana Kerja Sub Unit SKPD Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen Tahun 2021. Kebijakan Keuangan yang di terapkan tetap mengacu sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Anggaran Keuangan pada SKPD. Di antara ketentuan tentang pengelolaan keuangan yang sampai saat ini di pedomani yaitu Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mendasari ketentuan tersebut Kelurahan Kebumen sebagai SKPD yang hanya memiliki kewenangan sebagai pelaksana sehingga dalam penerapan kebijakan keuangan seoptimal mungkin melaksanakan pengelolaan keuangan dengan sebaik-baiknya. Proses pengajuan usulan anggaran bersama sama diajukan sesuai dengan tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan diawali dengan penyusunan Rencana Kerja dua tahun yang akan datang. Menjelang tahun anggaran berakhir berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran, SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran selanjutnya setelah APBD ditetapkan, maka menyusun kembali Dokumen Pelaksana Anggaran sebagai dokumen formal untuk mendukung program dan kegiatan setiap SKPD selama satu tahun anggaran.

Alokasi Anggaran yang sudah di tetapkan di setiap SKPD termasuk Sub Unit SKPD Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas tugas pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan, oleh karena itu pengelolaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan menjadi tolak ukur kinerja setiap SKPD.

Proses pengajuan pencairan anggran di setiap kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari pencermatan pengajuan anggaran sesuai dengan peruntukan alokasi sebagaimana tercantum jadwal dan alokasi anggaran dalam DPA sampai dengan proses pengajuan SPP, SPM dan PPPPpengajuan SP2D sehingga personil penatausahaan keuangan dari mulai pengguna anggaran, pejabat penatausahaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan sampai dengan bendahara di tuntut untuk saling memahami tugas dan peran fungsi masing- masing. Sebagai Sub SKPD juga di tuntt mampu untuk mengelola anggaran sampai dengan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban dimana secara administratif saat ini jauh lebih rumit dan prosedural. Kemampuan, kemauan personil menjadi persyaratan utama pelaksanaan administrasi dan model sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang harus diterapkan.

Pengelolaan keuangan di Kelurahan Kebumen sampai saat ini sudah mengacu kepada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 namun karena adanya keterbatasan SDM

dan sarana – prasarana penerapannya belum optimal sehingga kedepan diperlukan beberapa strategi untuk efektifitas nggaran Sub SKPD Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen melalui :

- a) Penyusunan Program dan Kegiatan berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan
- b) Penataan Personil Kelurahan melalui pemahaman tupoksi, penerapan disiplin, pengiriman diklat dan peran sebagai pelayan masyarakat sehingga kinerja secara bertahap akan meningkat.
- c) Melakukan kerjasama menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terutama pihak ketiga dalam membangun jejaring kerjasama dengan masyarakat dan pengusaha.
- d) Melakukan fasilitasi antara Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, warga masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

D. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN APBD SKPD

Indikator pencapaian target kinerja keuangan Sub Unit SKPD Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan pada setiap tahun anggaran, pencapaian target kinerja terlihat setelah kegiatan selesai dilaksanakan baik fisik kegiatan yang di hasilkan maupun meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sasaran. Keberhasilan suatu program kegiatan dapat terukur dari ditetapkannya beberapa indikator pencapaian target kinerja seperti input/ maukan anggaran, output dan outcome menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan dalam penyusunan usulan telah ditetapkan beberapa prioritas pembangunan tahun 2021 mengacu pada prioritas Tingkat Kabupaten yaitu:

- 1) Penanggulangan Kemiskinan dan pengurangan kemiskinan
- 2) Peningkatan akseptabilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.
- 3) Rehabilitasi dan pembangunan Infrastruktur perdesaan.
- 4) Revitalisasi pertanian dan pedesaan.
- 5) Peningkatan fasilitasi kepada pemerintahan desa.

Kelurahan Kebumen sebagai Sub Unit SKPD hanya memiliki kewenangan bersifat koordinatif dan fasilitasi maka dalam penyusunan pencapaian target kinerja keuangan SKPD selama ini mendasarkan input/ masukan anggaran, output dan outcome yang telah tercantum pada setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen Tahun Anggaran 2021 seperti kegiatan penunjang administrasi perkantoran dan kegiatan fasilitasi serta pembinaan warga masyarakat. Untuk program kegiatan teknis yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan Kebumen pengelolaan anggarannya langsung dilaksanakan oleh SKPD Dinas/ Badan/ Kantor terkait

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Kelurahan Kebumen Tahun Anggaran 2021 di buat sebagai saah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekwensi dari penggunaan dana APBD, serta sebagai perwujudan akuntabilitas SKPD sebagai sebuah entitas akuntansi / pelaporan.

Kebumen, 31 Desember 2021
LURAH KEBUMEN
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

TTD

SLAMET RIYADI, S.M, M.M
Penata
NIP : 19680101 198803 1 009